



# PROGRES IMPLEMENTASI **SAKIP**

---

DINAS PEMEBRDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
& KELUARAG BERENCANA (DP3AKB)  
KABUPATEN OMBOK TIMUR  
TAHUN 2023-2024



# MATERI PEMAPARAN **SAKIP**

**01**

**LATAR BELAKANG**

**02**

**PERENCANAAN**

**03**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

**04**

**EVALUASI & PENGAWASAN**

**05**

**LAMPIRAN**



**VISI :** “**LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN**”



**MISI :**

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih serta perumahan
2. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdaya saing dengan biaya terjangkau
3. Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya
4. **Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga → ( DP3AKB )**
5. Menciptakan keamanan dan ketertiban yang harmonis dalam masyarakat dengan meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan yang lebih baik dan religius
6. Meningkatkan reformasi birokrasi melalui pemekaran wilayah pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten untuk menuju aparatur yang bersih dan berorientasi kepada pelayanan publik



# RPJMD Kab. Lombok Timur 2018-2013

## RPJMD 2018-2023

## RENSTRA DP3AKB 2018-2023

Visi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur : “LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN”

MISI KE-4 “Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga”.

### TUJUAN

#### TUJUAN :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus
4. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

### SASARAN :

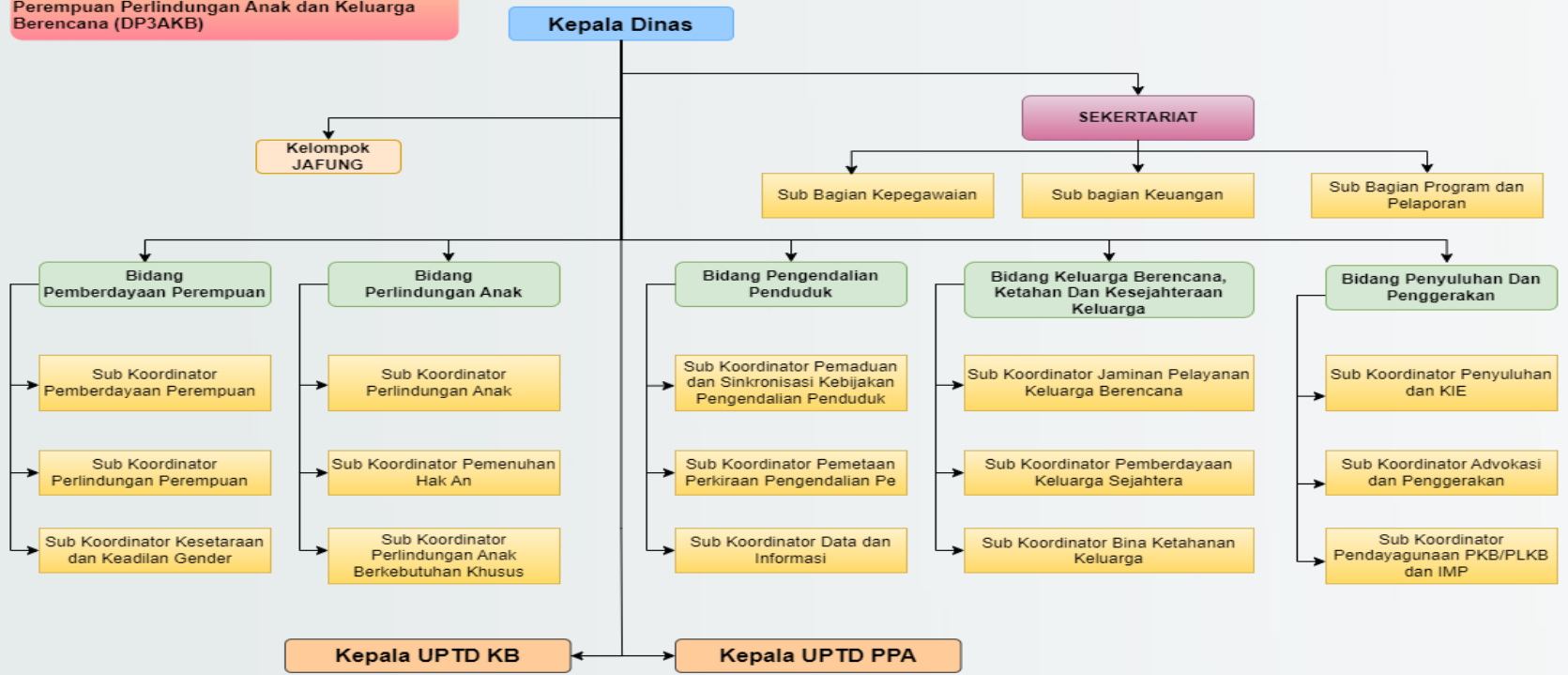
Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak

#### SASARAN :

1. Meningkatnya Upaya Pengarus Utamaan Gender
2. Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan
3. Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Anak
4. Meningkatkan Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga
6. Pemenuhan Sarana Pendukung Pelaksanaan Program

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS P3AKB LOMBOK TIMUR

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)



Sesuai Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Acuan Tugas, Fungsi Tata Kerja Dinas P3AKB



# SUMBERDAYA DINAS P3AKB LOMBOK TIMUR

## SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)

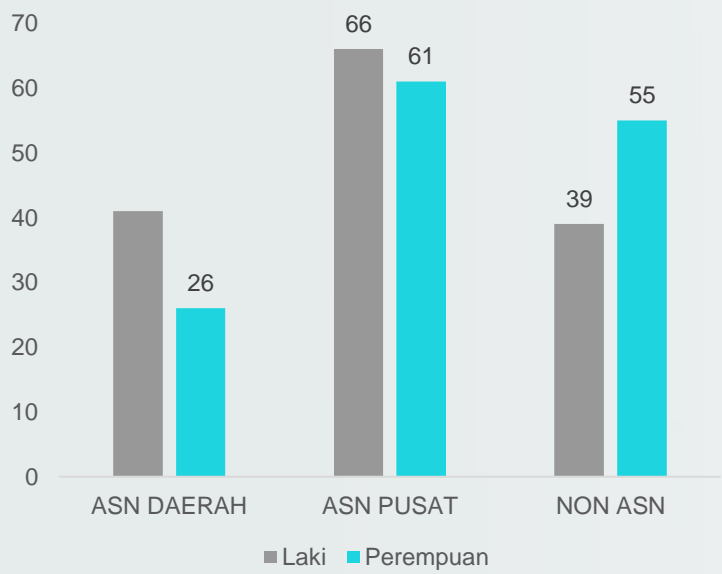


Diagram 1.1.1 Distribusi SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berdasarkan Status Kepegawaian per Tahun 2023

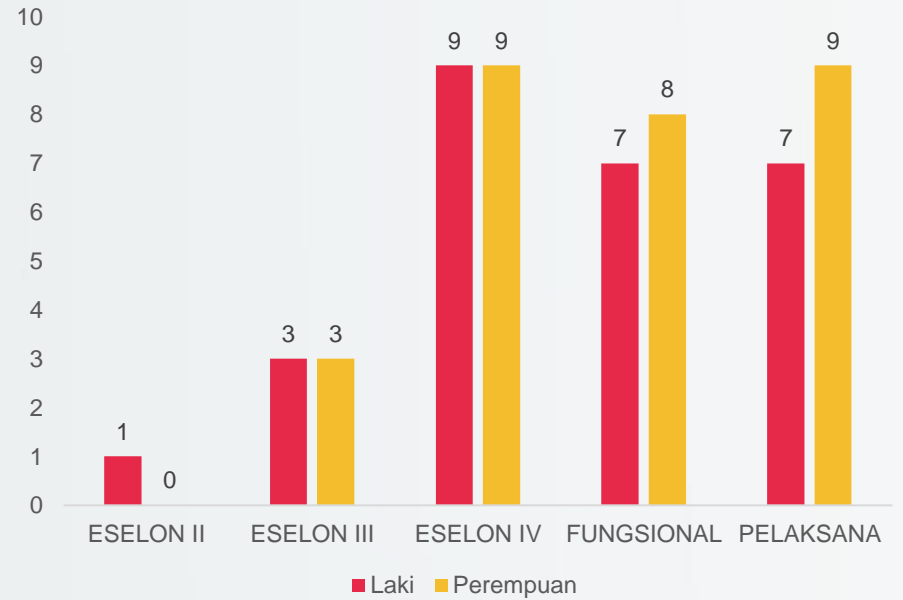


Diagram 1.1.2 Distribusi SDM ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berdasarkan Jabatan per Tahun 2023



## ● Indikator Kinerja Utama (IKU)

01

Meningkatkan Peran Serta Perempuan dalam pembangunan pada bidang ekonomi dan politik; Dengan target Kinerja tahun 2023 sebesar IPG = 91,7%

02

Pemenuhan hak hak anak dengan target Kinerja Tahun 2023 Kategori Kabupaten Layak Anak dicapai target Kategori Madya = 700 Point

03

Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Target 1,88%



## Tujuan

## Indikator Tujuan & Sasran

## Indikator Sasran

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	2023		
<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>												
Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG, IDG, Persentase perempuan di lembaga legislatif.	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	6	10	10	10	10	10	10	10
			Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	%	47,27	47,50	47,80	47,00	48,00	49,00	49,00	
Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang, dan belum optimalnya perlindungan terhadap kasus kekerasan, tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan perempuan pada situasi konflik dan bencana.	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Per 1000 Perempuan	2	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,5	
			Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	%	95	95	96	97	98	99	99	
Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Skor/ Tingkat -		pratama	pratama	pratama	pratama	madya	madya	
Tingginya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah dan penelantaran.	Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan	%								
			Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	%	95	96	97	98	99	99	99	
Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya pada saat kawin pertama di bawah usia 20 tahun	%	67,06	62	57	52	43	32	32	



# Pohon Kinerja

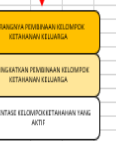
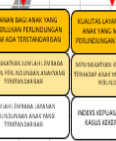
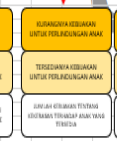
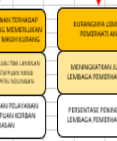
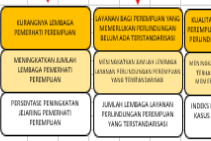
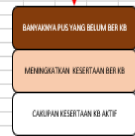
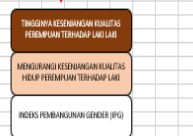
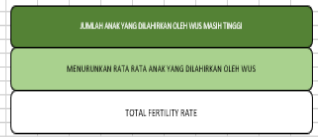
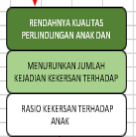
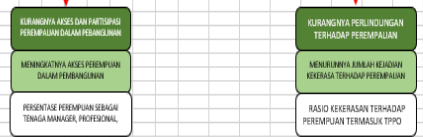
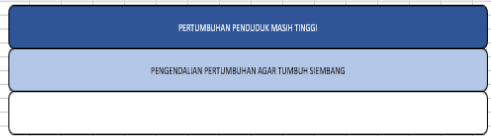
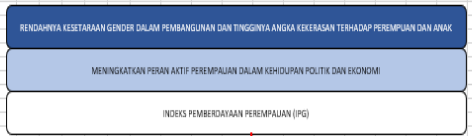
**POHON KINERJA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**TAHUN 2023**

ULTIMATE OUTCOME

INTERMEDIATE OUTCOME

IMMEDIATE OUTCOME

OUTPUT



Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
 Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
 Kabupaten Lombok Timur



M. Ahmat A. S. Kep. MM  
 No. 19661231 198003 1 306

# Cascading

CASCADED: KINERJA DINAS PEMBUDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023

RENDAHNYA KESETERAPAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAN TINGKINYA ANGKA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK  
 Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pembudayaan Perempuan dalam pembangunan dan Perlindungan Anak

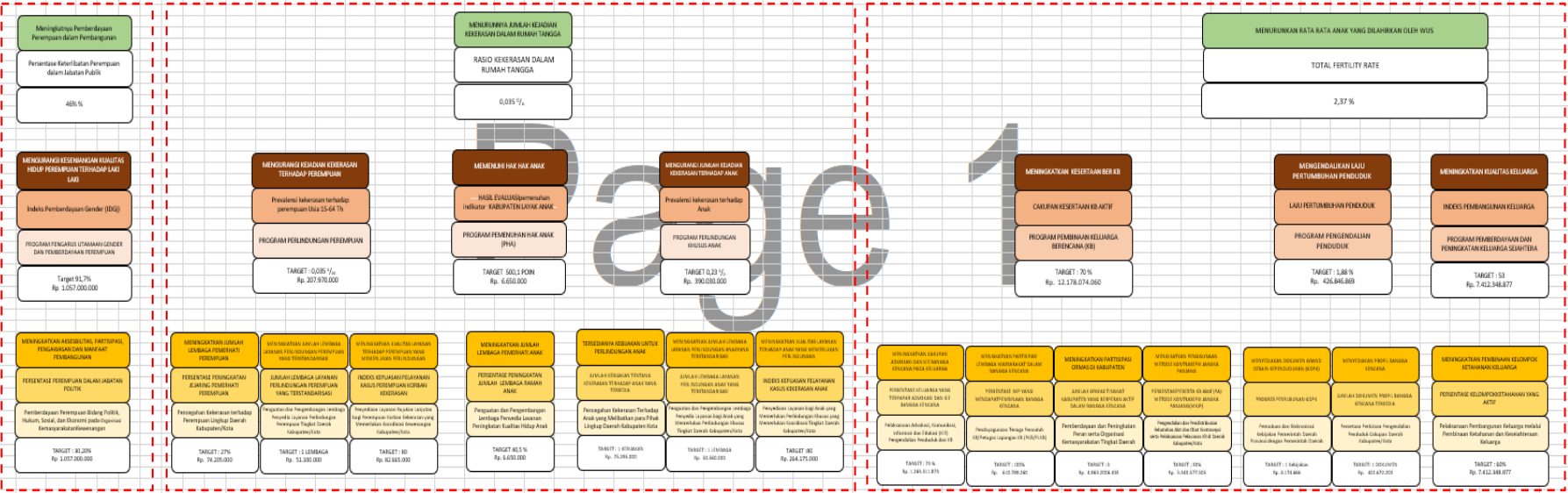
PERTUMBUHAN PENDUUK MASH TINNGI  
 PENGENDALIAN PERTUMBUHAN AGAR TUMBUH SIEMBAANG

TUJUAN

ESELO II B

ESELO

ESELO IV



Selang, 09 September 2023

Kepala Dinas Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur



Abdul A. S.Kep. MM  
 No. 19661231 19803 1 306

# Crosscutting

POHJ KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ULTIMATE OUTCOME

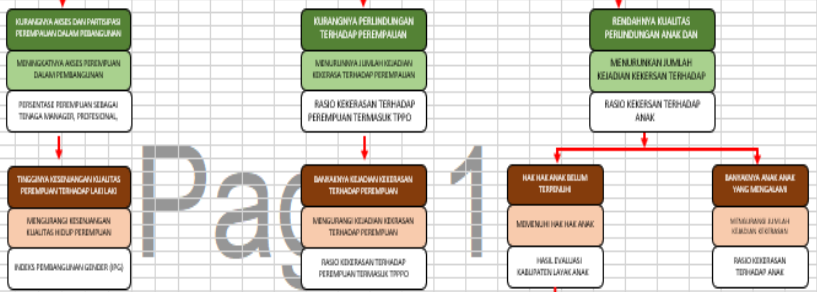
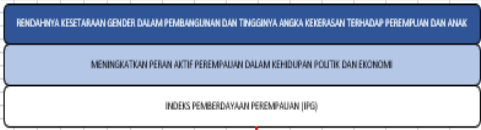
INTERMEDIATE OUTCOME

IMMEDIATE OUTCOME

OUTPUT

KINERJA

CROSSCUTTING



Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur

H. Ahmad A. S. Sg. NM  
Np. 19041231.1908031.1905

# Program dan Rencana Kinerja Tahun 2023

Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
1	2	3	4
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>	<b>%</b>	<b>91,7</b>
Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan dalam Jabatan Publik	%	49%
Sub. Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	4
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO</b>	<b>0/00</b>	<b>0,035/Seribu</b>
<b>Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Peningkatan jumlah jejaring dan pemerhati perempuan di Lombok Timur</b>	<b>%</b>	<b>10</b>
Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1
Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Baik	2
Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	102
Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Perempuan yang terstandarisasi	%	3
Sub. Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	1



<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak</b>	<b>Point</b>	<b>700</b>
Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Lembaga Ramah Anak	%	3
Sub. Kegiatan : Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	465
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase korban kekerasan terhadap anak yang tertangani</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>
Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak	Kebijakan	1
Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1
Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia layanan bagi yang memerlukan perlindungan memenuhi standar	Lembaga	3
Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1
Kegiatan : Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah Lembaga Penyedia layanan bagi yang memerlukan perlindungan yang terstandarisasi	Lembaga	204
Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	102



<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program.</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedia Dokumen Pertanggungjawaban belanja	Dokumen	1
Sub. Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	72
Sub. Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1
Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Asset/ barang milik daerah	%	100
Sub. Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Proses administrasi perkantoran terlaksana sesuai standar	%	100
Sub. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1
Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian layanan jasa penunjang	%	
Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	1
Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayar kan Pajaknya	Unit	2
Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan P erizinannya	Unit	228
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Laju Pertumbuhan Penduduk</b>	<b>%</b>	<b>2</b>
Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Dokumen Profil Bangsa Kencana Kabupaten Lombok Timur	Dokumen	1
Sub. Kegiatan : Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Dokumen	21
Sub. Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Tersedia profil Bangsa Kencana di masing masing Balai Penyuluhan	Dokumen	21
Sub. Kegiatan : Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	12
Sub. Kegiatan : Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Laporan	12
Sub. Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	Laporan	12

<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Cakupan Kesertaan KB Aktif</b>	<b>%</b>	<b>59</b>
Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Keluarga Yang terpapar Advokasi dan KIE programBangga Kencana	%	70
Sub. Kegiatan : Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Stakeholders dan Mitra Kerja yang terlibat dalam Program KKBPK	%	68
Sub. Kegiatan : Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen	105
Sub. Kegiatan : Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	2
Sub. Kegiatan : Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	42
Sub. Kegiatan : Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Persentase cakupan Laporan Kegiatan Balai Penyuluhan	Laporan	42
Sub. Kegiatan : Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	4
Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase IMP yang mendapatkan pembinaan program Bangga Kencana	%	54
Sub. Kegiatan : Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	62
Sub. Kegiatan : Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLK)	Laporan	42
Sub. Kegiatan : Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kader	10.150
Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	30
Sub. Kegiatan : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	6
Sub. Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	50.400
Sub. Kegiatan : Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	21
Sub. Kegiatan : Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	4
Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Ormas Tingkat Kabupaten yang berperan aktif dalam program Bangga Kencana	Ormas	3
Sub. Kegiatan : Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		10
Sub. Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	10
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)</b>	<b>%</b>	<b>54</b>
Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Poktan (BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKS) Yang Aktif	%	70
Sub. Kegiatan : Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	32
Sub. Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	764
Sub. Kegiatan : Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	2

## Capaian Kinerja Organisasi

### ❑ Tujuan Kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak dengan indikator keberhasilan tujuan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

### ❑ Sasaran Kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berdasarkan kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023 adalah :

1. Indeks Pembangunan Gender
2. Kategori Kabupaten Layak Anak "Madya"
3. Laju Pertumbuhan Penduduk

## Evaluasi dan analisis capaian kinerja

Untuk interpretasi terhadap hasil capaian dengan target yang telah disepakati, ditetapkan kategori interpretasi sebagai berikut :

1. >95% → **Predikat Kinerja Sangat Baik**
2. >80% - <95 % → **Predikat Kinerja Baik**
3. >50% - <80 → **Predikat Kinerja Cukup**
4. >50% → **Predikat Kurang**



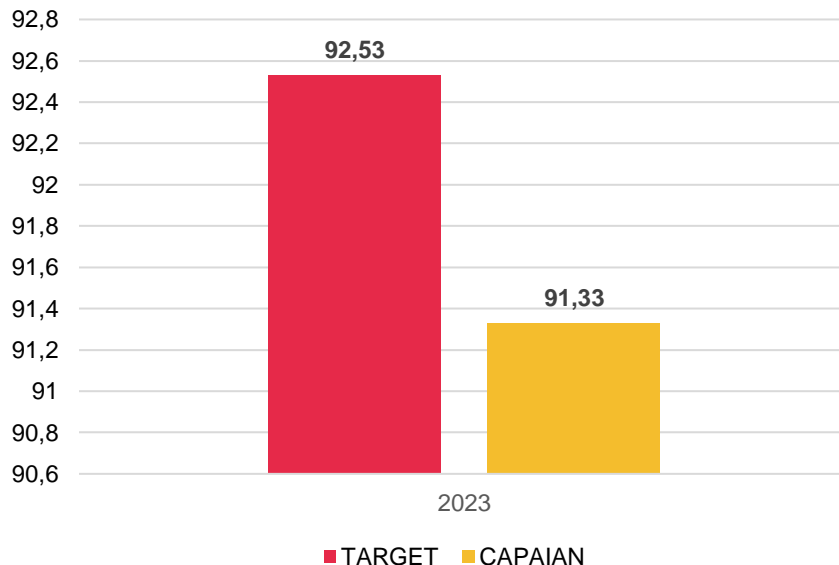
01

## Indeks Pembangunan Gender (IPG)

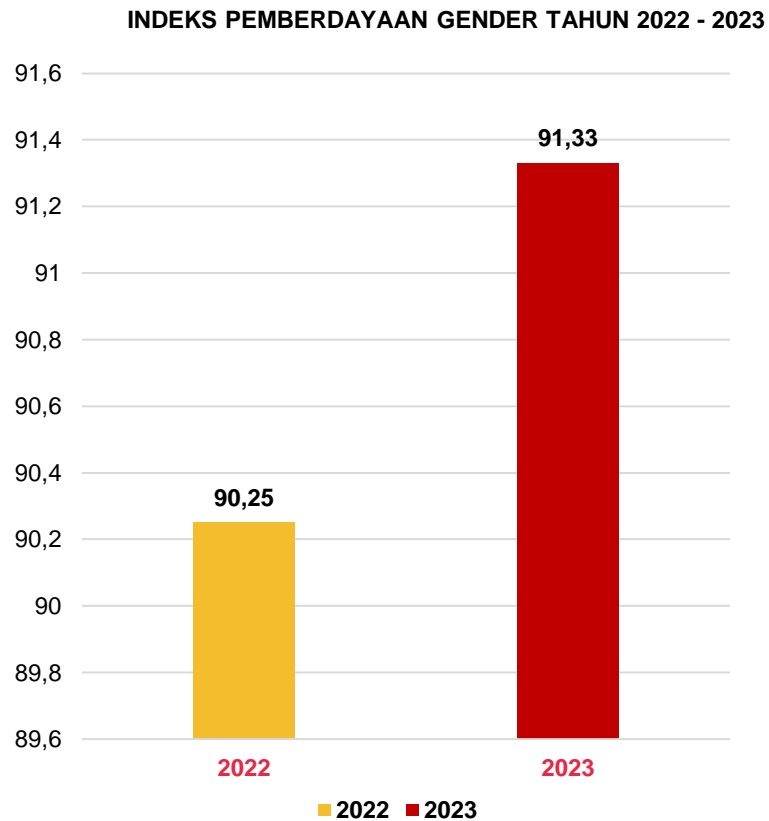
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki.

Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010.

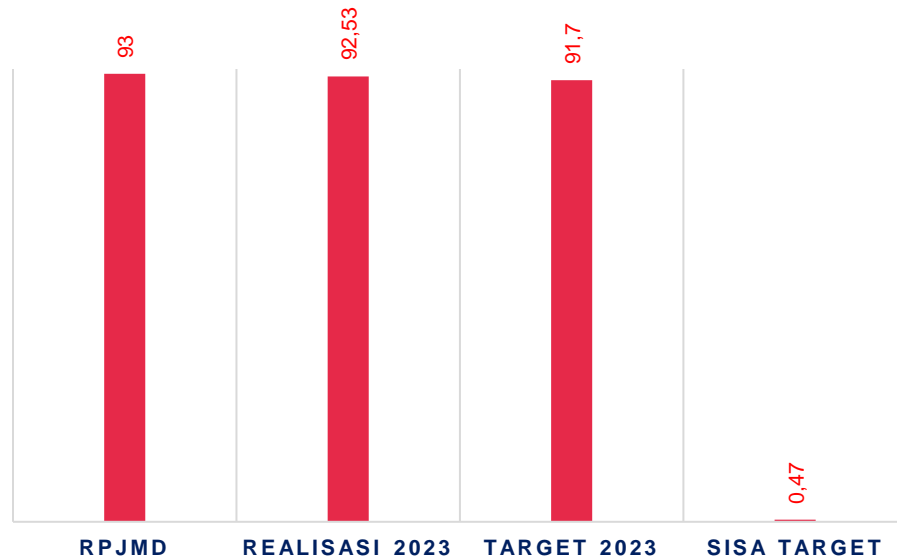
TARGET DAN CAPAIAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER TAHUN 2023



# Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2022 – 2023



## PERBANDINGAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER DALAM REALISASI KINERJA TERHADAP TARGET RPJMD



# Analisis Kinerja

## Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Anggota Legislatif menjadi bagian yang terpenting dalam mengendalikan roda pemerintahan. Rendahnya partisipasi politik perempuan di legislatif menjadi penghambat kemajuan perempuan, karena tidak mewakili secara penuh aspirasi kebutuhan perempuan. Ada beberapa faktor pendukung agar perempuan menjadi anggota legislatif yaitu Undang-undang, kemampuan internal perempuan, baik secara politik, sosial (dukungan keluarga dan masyarakat) dan financial.

Hal ini juga berbanding lurus dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang mengalami peningkatan sebesar 2,55%, hal ini menunjukkan upaya meningkatkan kesetaraan Gender dalam pembangunan sebagai tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak telah berda pada jalur yang sesuai, namun perlu upaya yang lebih konkrit terhadap implementasi dari capaian indikator tersebut

## Analisis Efisiensi penggunaan Sumber Daya

**Efisiensi penggunaan Sumber Daya dengan melibatkan dan memberi ruang partisipasi kepada beberapa Lembaga social masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan**

## Analisis Program Penunjang keberhasilan Pencapaian kinerja

Capaian kinerja tahun 2023 banyak ditunjang oleh program Pengarusutamaan Gender dengan melakukan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga Pemerintah; serta pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan.

Beberapa factor sebagai penyebab tidak tercapainya sasaran kinerja yaitu proporsi perempuan sebagai tenaga profesional dan pejabat administrasi khususnya dibidang pemerintahan.

Diantara faktor penghambat untuk pencapaian target kinerja yaitu, masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep kesetaraan gender dan kurangnya implamentasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan hal ini terlihat dari persentase OPD yang melakukan analisis PPRG yaitu sebesar 55% dari 40 OPD yang ada.

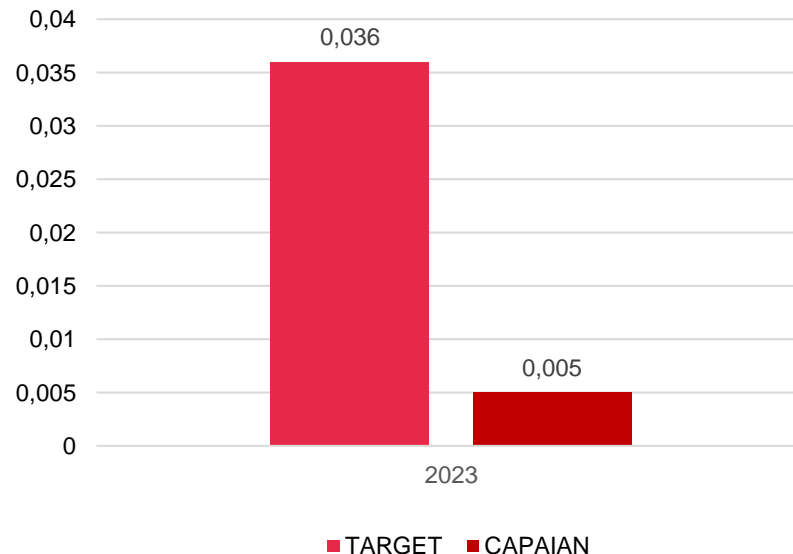
02

## Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)

indicator yang menunjukkan jumlah kejadian kekerasan yang dialami perempuan, angka ini menunjukkan sejauhmana pemerintah daerah memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan. Formula Perhitungan :

$$\frac{\text{jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP)}}{\text{jumlah penduduk perempuan}} \times 1000$$

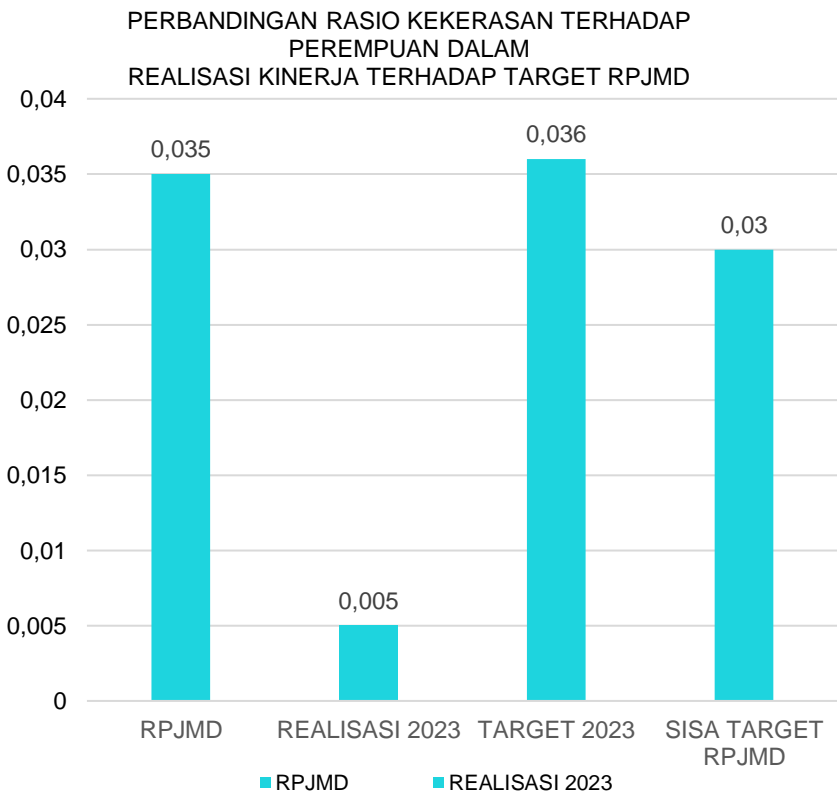
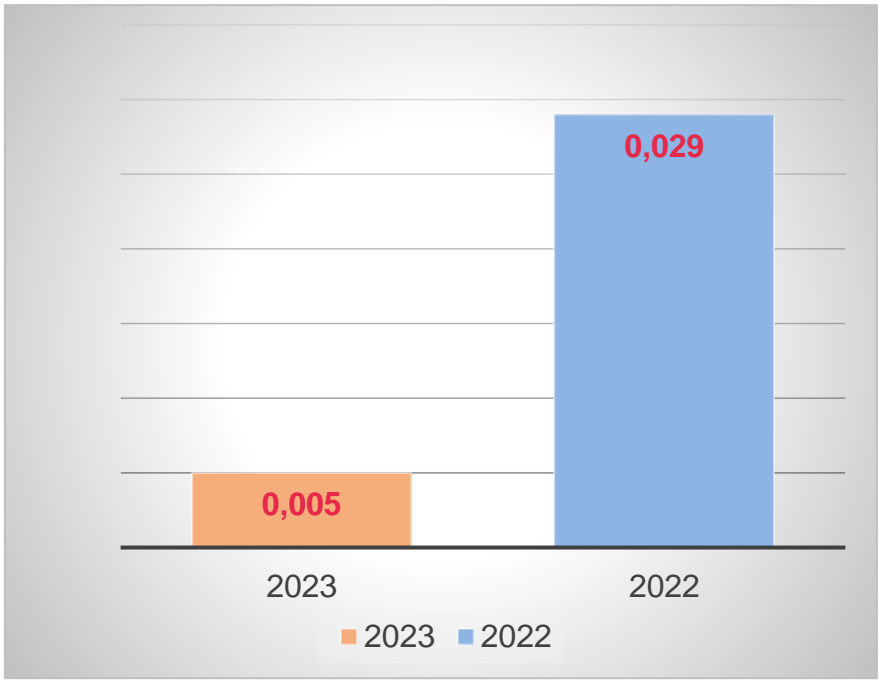
TARGET DAN CAPAIAN RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2022



Kinerja tujuan yang ditargetkan sebesar 0,036%; Realisasi kinerja yang dicapai pada tahun 2023 adalah 0,005%. Hal ini menunjukkan bahwa angka kejadian kekerasan terhadap perempuan berkurang lebih banyak dari yang ditargetkan.

# Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan

## Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2022 – 2023



# Analisis Kinerja

## Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

- ❑ Pada tahun 2023 kasus kekerasan berhasil diturunkan dari menjadi 0,005 % dari angka 0,036 yang ditargetkan. Akan tetapi angka 0,005 merupakan angka yang lebih besar dari tahun sebelumnya.
- ❑ Kasus yang menjadi numerator adalah kasus terlapor, sedangkan pada tahun 2023 promosi secara generik dilaksanakan agar masyarakat mau mengungkap dan melaporkan kasus yang dialami atau dilihatnya.
- ❑ Sehingga peningkatan kasus dapat disebabkan oleh keterbukaan masyarakat untuk melaporkan. Peningkatan kasus dari tahun sebelumnya juga dibarengi angka kejadian yang terlaporkan dibandingkan kasus yang ditangani adalah 100%. Artinya semua kasus terlapor dapat tertangani oleh unit terkait.

## Analisis Efisiensi penggunaan Sumber Daya

- ❑ Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan yang terlapor ditangani oleh unit khusus oleh UPTD PPA, yang sudah memiliki tenaga tenaga profesional sesuai kompetensinya.

## Analisis Program Penunjang keberhasilan Pencapaian kinerja

- ❑ Capaian kinerja tahun 2023 banyak ditunjang oleh program Pengarusutamaan Gender dengan melakukan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga lembaga Pemerintah; serta pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat.

# Capaian Kinerja Sasaran

01

Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi

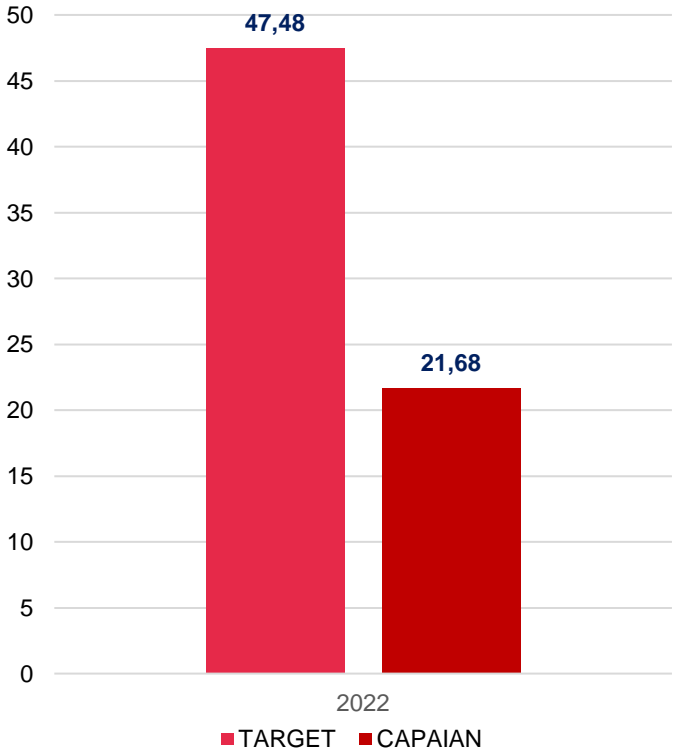
KRITERIA	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH POPULASI
Anggota DPR	5	50
ASN Pejabat Eselon 2	2	39
ASN Pejabat Eselon 3	26	218
ASN Pejabat Eselon 4	246	823
Lain lain	0	0
<b>Total</b>	<b>279</b>	<b>1.145</b>

## •Realisasi Kinerja terhadap Target tahun 2022

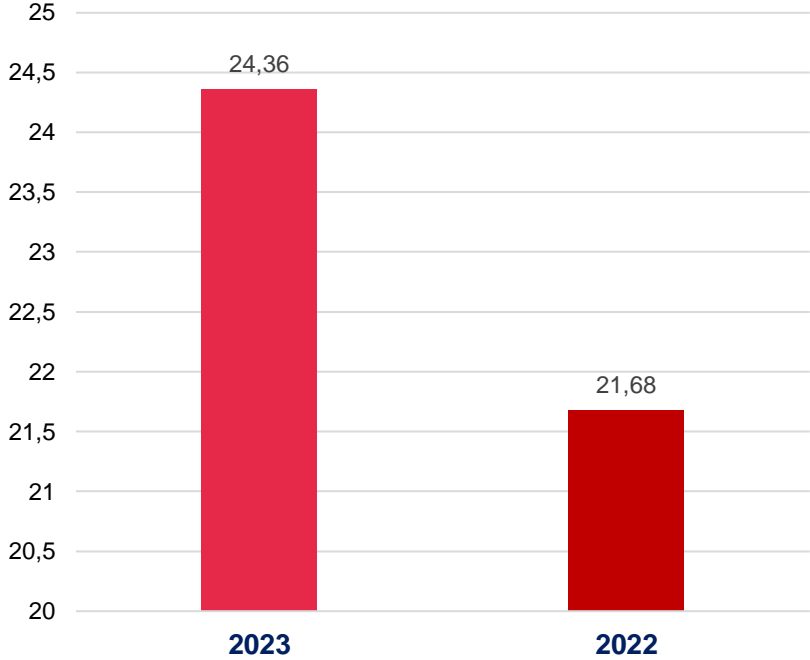
Terhadap pernyataan kinerja Persentase Perempuan Profesional, manajer, Administrasi dan Teknis, yang ditargetkan sebesar 47,48%; Realisasi kinerja yang dicapai pada tahun 2023 adalah 24,36% perempuan dari total populasi perempuan sebanyak 1.145 orang.

# Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran

TARGET DAN CAPAIAN PERSENTASE PEREMPUAN PROFESIONAL, MANAJER, ADMINISTRASI DAN TEKNIS TAHUN 2022

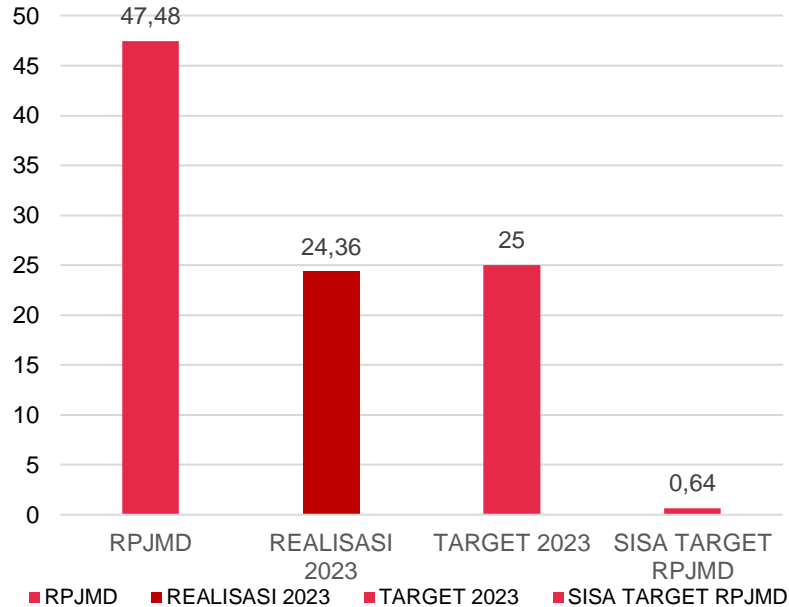


PERSENTASE PEREMPUAN PROFESIONAL, MANAJER, ADMINISTRASI DAN TEKNIS TAHUN 2021 - 2022





PERBANDINGAN PERSENTASE PEREMPUAN PROFESIONAL,  
MANAJER, ADMINISTRASI DAN TEKNIS DALAM  
REALISASI KINERJA TERHADAP TARGET RPJMD



Dalam RPJMD ditargetkan pada tahun 2023 Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknis sebesar 47,48%.

### Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Capaian kinerja tahun 2023 baik terhadap target kinerja tahun 2022, maupun terhadap target RPJMD masih belum tercapai, beberapa hal yang dapat mempengaruhi angka tersebut adalah :

- ❖ Belum tersedia data memadai yang dapat mewakili seluruh perempuan profesional di sektor non pemerintahan.
- ❖ Ketersediaan SDM perempuan untuk menjadi manajer maupun tenaga teknis masih lebih sedikit dibandingkan SDM laki-laki.
- ❖ Masih kuatnya stigma hanya laki-laki yang layak menjadi pemimpin dimasyarakat.

Terhadap hal tersebut beberapa hal yang telah dilakukan yaitu :

1. Mengoptimalkan koordinasi antar OPD dan Lembaga kemasyarakatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.
2. Melakukan edukasi dan bimbingan kewirausahaan dan manajerial terhadap beberapa kelompok Wanita yang ada.
3. Meningkatkan Kerjasama dan koordinasi dengan Lembaga non pemerintah

## 02

### Kategori Kabupaten Layak Anak

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Dengan kategori Kabupaten/kota Layak Anak:

1. Utama
2. Nindya
3. Madya
4. Pratama

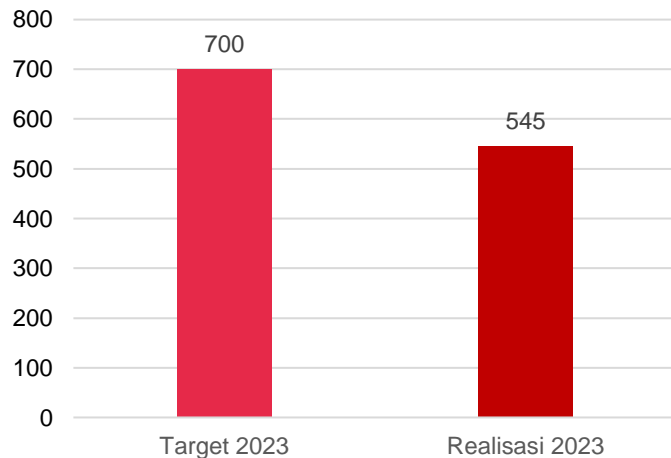
### Realisasi Kinerja terhadap Target tahun 2023

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Kabupaten Lombok Timur ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak dengan Kategori Pratama hal ini sesuai dengan target kinerja yang direncanakan yaitu Kabupaten Layak Anak dengan Kategori Nindiya = 700 Point



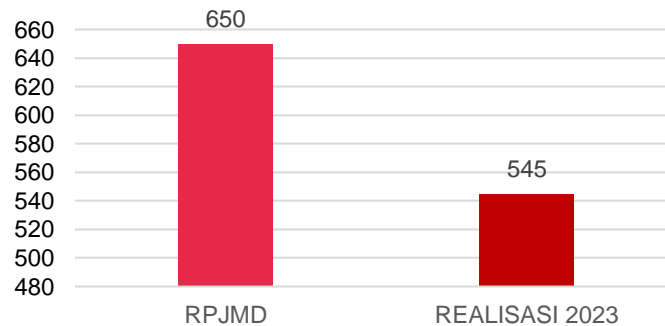
# Perbandingan Kinerja Sasaran

## TARGET KINERJA DAN REALISASI TAHUN 2023



■ Target 2023 ■ Realisasi 2023

## PERBANDINGAN HASIL PENILAIAN KLA TERHADAP TARGET RPJMD



■ RPJMD ■ REALISASI 2023

## Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran KLA

Capaian kinerja baik terhadap target tahun 2023 maupun target dalam RPJMD dapat tercapai, Adapun kriteria KLA berdasarkan Kabupaten adalah sebagai berikut

NO	KABUPATEN	KATEGORI
1	Bima	594,00
2	Dompu	662,15
3	Lombok Barat	654,50
4	Lombok Tengah	
5	Lombok Timur	545 pOITN
6	Lombok Utara	
7	Sumbawa	505,85
8	Sumbawa Barat	
9	Kota Bima	694,70
10	Kota Mataram	622,50

## Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya KLA

Dalam upaya pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak, dengan belajar pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun 2023 dibentuk TIM pendukung penyediaan data dukung. Sehingga ketersediaan data dukung dapat terwujud sesuai target waktu yang direncanakan.

## Analisis Program Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja KLA

Pencapaian Predikat KLA kategori Pratama bagi Kabupaten Lombok Timur dicapai berkat dukungan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penvedia Lavanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

# Capaian Kinerja Sasaran **Anga Kelahiran Total (TFR)**

02

## Anga Kelahiran Total (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya, Formula Perhitungan :

$$TFR = \frac{1}{1000} * 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$$

Dimana :

$$ASFR_i = \frac{B_i}{P_i} \times 1000$$

$B_i$  : jumlah kelahiran dari wanita kelompok usia  $i$

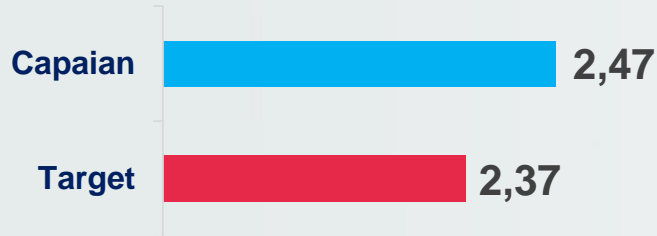
$i$  : kelompok usia (15-19), (20-24), (25-29), (30-34), (35-39), (40-44), (45-49) tahun

$P_i$  : jumlah wanita kelompok usia  $i$

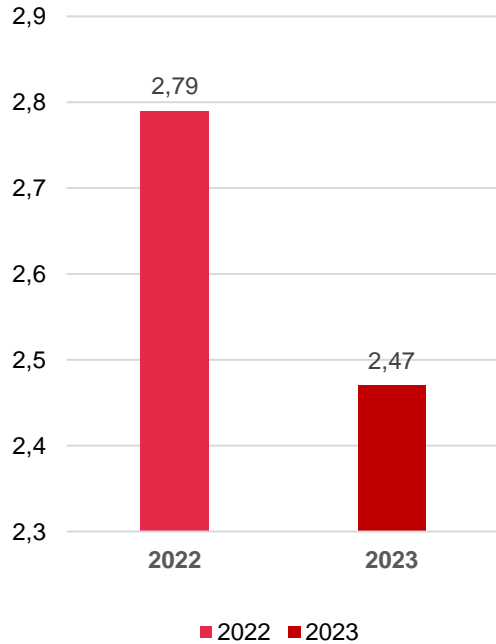
Sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

## Realisasi Kinerja terhadap program 2022

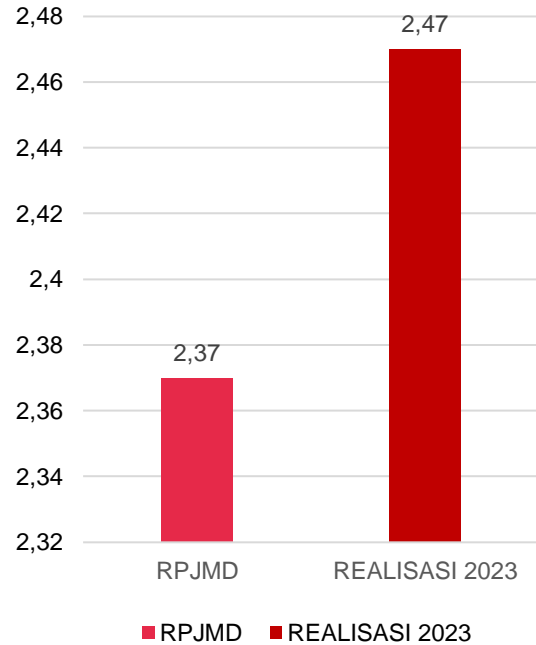
Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2023 adalah 2,41 ini berarti bawah setiap perempuan di Kabupaten Lombok Timur selama masa suburnya melahirkan anak dengan rata 2 anak lebih



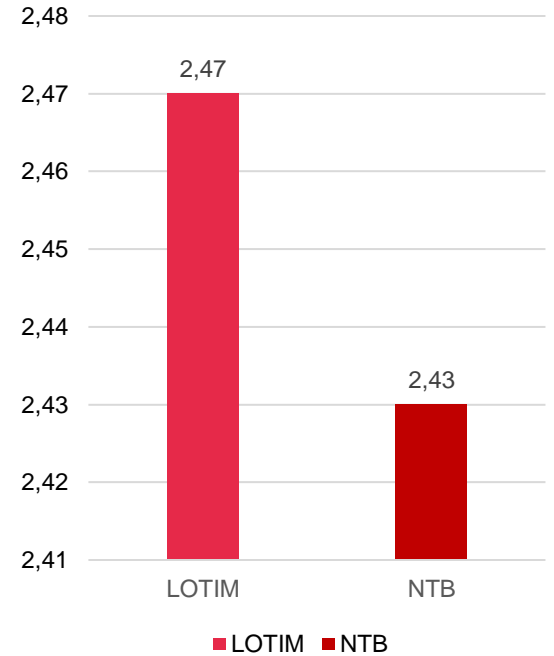
TOTAL FERTILITY RATE TAHUN 2022 - 2023



TOTAL FERTILITY RATE REALISASI KINERJA TERHADAP TARGET RPJMD



PERBANDINGAN TOTAL FERTILITY RATE LOMBOK TIMUR DENGAN PROVINSI NTB TAHUN 2023



## Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Tingginya angka TFR ini selain disebabkan oleh kejadian kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need for family planning), juga disebabkan oleh belum maksimalnya program dan strategi yang dilakukan selain kurangnya petugas pelayanan keluarga berencana (KB) dan menurunnya dukungan pemerintah daerah terhadap program keluarga berencana

## Analisis Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya penurunan angka TFR di kabupaten Lombok Timur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melalui Unit Pelaksana Teknis yang ada di setiap kecamatan, berupaya meningkatkan dan memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat.

## Analisis Program Penunjang keberhasilan Pencapaian kinerja

Upaya untuk menurunkan angka TFR, melalui Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota





# Akuntabilitas Keuangan

# Anggaran dan Realisasi Anggaran Program kegiatan

Uraian Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
1	6	7	8
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	542.000.000	542.000.000	100,00
Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	542.000.000	542.000.000	100,00
Sub. Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	542.000.000	542.000.000	100,00
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	207.970.000	193.975.000	93,27
Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	74.205.000	71.705.000	96,63
Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	74.205.000	71.705.000	96,63
Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	82.665.000	78.850.000	95,38
Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	82.665.000	78.850.000	95,38
Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.100.000	43.420.000	84,97
Sub. Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	51.100.000	43.420.000	84,97

<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>6.650.000</b>	<b>6.650.000</b>	<b>100,00</b>
Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	6.650.000	6.650.000	100,00
Sub. Kegiatan : Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6.650.000	6.650.000	100,00
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>390.030.000</b>	<b>372.805.000</b>	<b>95,58</b>
Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	75.295.000	69.320.000	92,06
Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	75.295.000	69.320.000	92,06
Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	264.175.000	252.925.000	95,74
Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	264.175.000	252.925.000	95,74
Kegiatan : Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	50.560.000	50.560.000	100,00
Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.560.000	50.560.000	100,00

<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.825.627.828</b>	<b>8.723.232.065</b>	<b>98,84</b>
<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.687.832.828</b>	<b>8.629.130.285</b>	<b>99,32</b>
<b>Sub. Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>7.842.941.974</b>	<b>7.792.840.394</b>	<b>99,36</b>
<b>Sub. Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>844.890.854</b>	<b>836.289.891</b>	<b>98,98</b>
<b>Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.094.000</b>	<b>10.094.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Sub. Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>10.094.000</b>	<b>10.094.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>59.504.000</b>	<b>42.835.340</b>	<b>71,99</b>
<b>Sub. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>57.704.000</b>	<b>41.035.340</b>	<b>71,11</b>
<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>14.400.000</b>	<b>9.792.120</b>	<b>68,00</b>
<b>Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>14.400.000</b>	<b>9.792.120</b>	<b>68,00</b>
<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>53.797.000</b>	<b>31.380.320</b>	<b>58,33</b>
<b>Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>5.720.000</b>	<b>1.774.375</b>	<b>31,02</b>
<b>Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>48.077.000</b>	<b>29.605.945</b>	<b>61,58</b>

<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>11.421.737.000</b>	<b>10.405.640.220</b>	<b>91,10</b>
<b>Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>1.185.050.000</b>	<b>1.075.109.720</b>	<b>90,72</b>
Sub. Kegiatan : Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	120.000.000		0,00
Sub. Kegiatan : Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	4.500.000	4.500.000	100,00
Sub. Kegiatan : Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	150.000.000	100,00
Sub. Kegiatan : Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	273.000.000	262.500.000	96,15
Sub. Kegiatan : Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	557.550.000	459.224.720	82,36
Sub. Kegiatan : Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	78.900.000	98,63
<b>Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>572.850.000</b>	<b>571.390.000</b>	<b>99,75</b>
Sub. Kegiatan : Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	62.000.000	62.000.000	100,00
Sub. Kegiatan : Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2.850.000	1.390.000	48,77
Sub. Kegiatan : Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	508.000.000	508.000.000	100,00
<b>Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.008.837.000</b>	<b>4.104.140.500</b>	<b>81,94</b>
Sub. Kegiatan : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	36.000.000	33.082.000	91,89
Sub. Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3.036.698.000	2.235.775.000	73,63
Sub. Kegiatan : Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.914.839.000	1.815.483.500	94,81
Sub. Kegiatan : Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21.300.000	19.800.000	92,96
<b>Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>4.655.000.000</b>	<b>4.655.000.000</b>	<b>100,00</b>
Sub. Kegiatan : Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.229.000.000	3.229.000.000	100,00
Sub. Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.426.000.000	1.426.000.000	100,00

<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>396.425.000</b>	<b>349.542.460</b>	<b>88,17</b>
<b>Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>396.425.000</b>	<b>349.542.460</b>	<b>88,17</b>
<b>Sub. Kegiatan : Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Sub. Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga</b>	<b>64.200.000</b>	<b>58.500.000</b>	<b>91,12</b>
<b>Sub. Kegiatan : Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga</b>	<b>200.400.000</b>	<b>196.400.000</b>	<b>98,00</b>
<b>Sub. Kegiatan : Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</b>	<b>126.000.000</b>	<b>88.817.460</b>	<b>70,49</b>
<b>Sub. Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana</b>	<b>3.325.000</b>	<b>3.325.000</b>	<b>100,00</b>

<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>6.952.055.000</b>	<b>6.890.599.708</b>	<b>99,12</b>
<b>Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>6.952.055.000</b>	<b>6.890.599.708</b>	<b>99,12</b>
<b>Sub. Kegiatan : Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</b>	<b>360.000.000</b>	<b>352.920.000</b>	<b>98,03</b>
<b>Sub. Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</b>	<b>6.585.900.000</b>	<b>6.531.524.708</b>	<b>99,17</b>
<b>Sub. Kegiatan : Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</b>	<b>6.155.000</b>	<b>6.155.000</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>28.742.494.828</b>	<b>27.484.444.453</b>	<b>95,62</b>



# Evaluasi dan Pengawasan

# Hasil Penilaian Evaluasi Sakip 2022

Pada hari ini, Senin tanggal 29 Mei 2023 telah dilaksanakan konfirmasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur sesuai standar evaluasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan nilai sebesar

**66,16 % kategori “B” atau Baik**



## PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Prof.Moh.Yamin, SH, Selong  
Fax. (0376) 2923429 Tlp. (0376) 2921235 - 2923239

### BERITA ACARA KONFIRMASI HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2023

Pada hari ini, Senin tanggal 29 Mei 2023 telah dilaksanakan konfirmasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur sesuai standar evaluasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan nilai sebesar 66,16 % kategori “B” atau Baik dengan rincian sebagai berikut :

.....



# Rincian Hasil penilaian Evaluasi AKIP 2022

KRITERIA PENILAIAN		Nilai Maksium	Hasil Prolehan Penilaian	Satuan
<b>I. Perencanaan Kinerja</b>		30	21	%
1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6	4,2	%
2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9	6,3	%
3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	10,5	%
<b>II. Pengukuran Kinerja</b>		30	18,9	%
1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6	3	%
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9	5,4	%
3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15	10,5	%
<b>III. Pelaporan Kinerja</b>		15	10,5	%
1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3	2,1	%
2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya	4,5	3,15	%
3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,5		%
<b>IV. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>		25	15,7	%
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5	3	%
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,5	5,25	%
3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,5	7,5	%
<b>TOTAL HASIL PENILAIAN</b>			<b>66,16</b>	<b>%</b>

# Catatan Hasil penilaian Evaluasi AKIP 2022

No	Catatan
1	Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
2	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
3	Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan, akan tetapi belum memanfaatkan E-Kinerja.
4	Dokumen Laporan Kinerja belum disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
5	Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
6	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berjenjang.
7	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai
8	Belum seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.
9	Belum terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal, hal ini dilihat rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti namun belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

# Rekomendasi Hasil penilaian Evaluasi AKIP 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lajut
1	Kepala DP3AKB agar menyusun Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan data kinerja	Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja Akan disusun oleh Kepala Dinas beserta Tim di DP3AKB
2	Kepala DP3AKB agar berkoordinasi dengan Kepala BKPSDM terkait penerapan e-kinerja yang dapat mengukur capaian kinerja sampai dengan kinerja individu	Kepala dinas Akan Berkoordinasi dengan BKPSDM terkait dengan penerpaan E-Kinerja
3	Kepala DP3KB agar menerapkan pemberian reward/funishment dengan memanfaatkan data e-kinerja	Kepala dinas Sudah melakukan Langkah awal terkait dengan penerpan sanksi dan reward dengan melakukan pendalamn materi kepada staf terait dengan Peraturan Bupati
4	Kepala DP3AKB agar memerintahkan koordinator fungsional perencana agar menyusun Laporan Kinerja sesuai standar penyusunan LKJIP.	Kepala Dinas Sudah Memerintahkan kepada Fungsional Perencan untuk Menyusun aporan Kinerja ssuai dengan standar Penyusunan LKJIP
5	Kepala DP3AKB agar memerintahkan koordinator fungsional perencana agar menyusun Laporan Kinerja sesuai standar penyusunan LKJIP, salah satunya dengan menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan	Kepala Dinas Sudah Memerintahkan kepada Fungsional Perencan untuk Menyusun aporan Kinerja ssuai dengan standar Penyusunan LKJIP
6	Kepala DP3AKB agar melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang.	Kepala DP3AKB Sudah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang.
7	Kepala DP3AKB agar meningkatkan kualitas penilaian internal secara standar dengan pendalaman yang memadai serta melibatkan semua pihak yang terkait.	Kepala DP3AKB akan meningkatkan kualitas penilaian internal Secara berkesinambungan
8	Kepala DP3AKB agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	Kepala DP3AKB akan berusaha menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
9	Kepala DP3AKB agar lebih meningkatkan lagi implementasi SAKIP dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai ketentuan.	Kepala DP3AKB Akan Berusaha meningkatkan lagi implementasi SAKIP dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi.



# Perencana Program Pengentasan Kemiskinan





Uraian Program / Kegiatan	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSEN TASE
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	6.952.055.000	6.890.599.708	99,12
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6.952.055.000	6.890.599.708	99,12



# KELUARGA BERENCANA

## manfaat Ber KB

Biaya Ber-KB  
dianggung  
oleh JKM-BIS



# Lampiran



# PK Kepala Dinas 2023

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LOMBOK TIMUR



### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. AHMAT A, S.Kep. MM.**  
Jabatan : **Kepala Dinas**  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **MUHAMMAD JUAINI TAOFIK**  
Jabatan : **Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR**  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selong, 27 September 2023  
Pihak Pertama

Pihak Kedua

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR



**MUHAMMAD JUAINI TAOFIK**

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan Perlindungan Anak dan  
Keluarga Berencana Kabupaten  
Lombok Timur ↓



**H. AHMAT A, S.Kep. MM.**  
Pembina Utama Muda / IV/c  
NIP. 19661231 198803 1 306

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	1. Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,7
2	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Anak	2. Tingkat Capaian Kota/Kabupaten Layak Anak	predikat	Pratama
3	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	3. Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,88
4	Terwujudnya Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	4. Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program	%	100

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	542.000.000	
2	Program Perlindungan Perempuan	207.970.000	
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	6.650.000	
4	Program Perlindungan Khusus Anak	390.030.000	
5	Program Pengendalian Penduduk	396.425.000	
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana	11.421.837.000	
7	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.952.055.000	
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.825.627.828	
<b>TOTAL</b>		<b>28.742.594.858</b>	

Pihak Kedua

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR



**MUHAMMAD JUAINI TAOFIK**

Pihak Pertama

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Lombok Timur ↓



**H. AHMAT A, S.Kep. MM.**  
Pembina Utama Muda / IV/c  
NIP. 19661231 198803 1 306



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**  
 Jl. Prof. M. Yamin, SH, Nomor 57 Blok. 1A.1 5 Kode Pos. 83612 Sobong

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
 NOMOR: 476/04.a/P3AKB/2023

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi capaian IKU pelaksanaan program dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, penegakan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak tahun 2023 berdasarkan target Rencana Strategis diperlukan Indikator Kinerja  
 b. bahwa untuk mengukur evaluasi capaian perlu ditetapkan target kinerja tahun 2023.  
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);  
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614)  
 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

# IKU 2023

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan Pertama	: Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023
Kedua	: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur.
Ketiga	: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud padadiktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Pemkab Lombok Timur.
	: Target Indikator Kinerja yang akan dicapai adalah : 1. Indeks Pembangunan Gender sebesar 91,7 (indeks) 2. Tingkat Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak Pratama (Predikat) 3. Laju Pertumbuhan Penduduk 1,88 (%)
Keempat	: Keputusan berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Selong  
 Pada Tanggal : 3 Januari 2023

**Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan**  
**Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**  
**Kabupaten Lombok Timur**

**H. Ahmat A. S. Kep. MM**  
 Nip. 196542911988031306

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas P3AKB  
 Nomor : 476/04.a/P3AKB/2023  
 Tanggal : 02 Januari 2023

No	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	KRITERIA
	Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki	Perbandingan IPM laki-laki dan perempuan	BPS	Semakin mendekati angka 100 semakin baik
	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Anak	Tingkat Capaian Kota/ Kabupaten Layak Anak	Kategori	Kategori Kota/Kabupaten Layak anak menggambarkan sistem dan mekanisme secara terintegrasi terhadap penentuan hak anak secara menyeluruh	Evaluasi dilakukan oleh Kementerian PPA, dengan melakukan penilaian terhadap 5 klaster melalui pengisian kuisioner dan upload dokumen pendukung secara online, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dokumen secara langsung	Kementerian PPA	1. Kategori Mentor 2. Kategori Utama 3. Kategori Madya 4. Kategori Pratama
	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	Laju Pertumbuhan Penduduk memberikan gambaran pengendalian populasi penduduk	(1/Periode) x (Indeks Awal - Indeks Akhir) / Indeks Awal x 100	BPS	Semakin rendah semaksimal

**Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan**  
**Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**  
**Kabupaten Lombok Timur**

**H. Ahmat A. S. Kep. MM**  
 Nip. 196542911988031306



# AKUN e-SAKIP

User : dp3akb

Password : Merdeka88

# Penghargaan 2023



**KLA**  
**“ Pratama ”**



*Matur Tampiasih*  
**Terimakasih**